LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

SEKRETARIAT DPRD KAB LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Izin-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 telah selesai disusun. Laporan ini disusun berdasarkan Pelaksanaan Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 serta sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat Capaian Kinerja Pelaksanaan Program sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan berpedoman kepada Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026. Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternative penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai Bahan Penilaian Kinerja dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dimasa sekarang maupun akan datang.. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2022 ini kemudian dituangkan kedalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022. Sebagai bentuk prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 23 Februari 2022

SEKRETARIS DPRD,

ASWAN AZIS,S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. :19760316 200803 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2020. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama, walaupun beberapa IKU tidak mencapai target yang sudah di tentukan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan masih rendahnya pemahaman aparatur dibidang indikator yang terukur dan outcome dari masing-masing kegiatan.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
IHKTIAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang 1
Maksud dan Tujuan 2
Gambaran Umum dan Organisasi 3
Struktur Organisasi 3
Komposisi SDM 5
Peran Organisasi 8
Isu Strategis 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Rencana Strategis 10
Program Untuk Pencapaian Sasaran 10
Indikator Kinerja Utama (IKU) 12
Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36
BAB IV PENUTUP..... 98
LAMPIRAN 100

DAFTAR TABEL

Tabel Hal

Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur 7

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur 13

Tabel 2.2 Program untuk pencapaian Sasaran Tahun 2022 15

Tabel 2.3 Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2022 15

Tabel 2.4 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 18

Tabel 2.5 IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 38

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 40

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 2022..... 40

Tabel 3.3 Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja 41

Tabel 3.4 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Cakupan Kinerja Kapasitas Lembaga DPRD..... 42

Tabel 3.5 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Cakupan Kinerja Fungsi Pengawasan dan Penganggaran DPRD..... 43

Tabel 3.6 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Cakupan Kinerja Fungsi Perundang-Undangan DPRD..... 44

Tabel 3.7 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun tahun 2021 dan Tahun 2022 44

Tabel 3.8 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis organisasi 45

Tabel 3.9 Uraian Capaian kinerja, Permasalahan dan Solusi Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 52

Tabel 3.10 Perbandingan Target Tahun 2021 Dengan Realisasi Tahun 2022..... 71

Tabel 3.11 Capaian Program Rutiun Tahun 2022 71

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Program Rutin Tahun 2021 dan Tahun 2022..... 73

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Program Rutin Tahun 2021 dan Tahun 2022.... 75

Tabel 3.14 Realisasi Pelakssanaan Progran Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022 80
Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Seklretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal
Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4
Gambar 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenkang Pendidikan	6
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	
Gambar 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	76

1. Bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 71 : kepala Daerah mempunyai kewajibanuntuk memberikan laporan keterangan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyrakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 5, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf (a)erdiriatas:
   a. Capaian kinerja makro;
   b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah ; dan
   c. Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renvana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabaupaten Luwu timur Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai lembaga yang memfasilitasi berbagai kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menduduki posisi yang cukup strategis dalam mendukung tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD. Untuk menciptakan pelayanan yang prima, tentu diperlukan unsur aparatur yang profesional dan memiliki kinerja yang handal.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 tahun 2014, adalah :

a. Menyelanggarakan Administrasi Kesekretariatan

b. Menyelenggarakan Administrasi keuangan

c. Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta

d. Menyediakan dan Mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Didalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD . Kabupaten Luwu Timur dalam upayanya mewujudkan Good governance dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP). Sehubungan dengan itu Sekretariat DPRD sebagai Supporting Sistem terhadap Prosedur dan Tata Kerja Alat Kelengkapan DPRD perlu memberikan dukungan baik dukungan Teknis, Administratif, dan keahlian. Dukungan tersebut perlu diaplikasikan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah) butuh kurun waktu 5 Tahun, RKPD/RENJA (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan / Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun maupun rencana Strategi yang sejalan, selaras dengan VISI, MISI, dan RPJPD, RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Maksud dan Tujuan

Penilaian terhadap tanggungjawab atau akuntabilitas kinerja pada akhirnya akan bermuara pada penilaian masyarakat terhadap baik buruknya citra birokrasi termasuk jajaran sekretariat DPRD. Kemudian secara umum instansi atau unit kerja dinilai berhasil, apabila mampu melaksanakan tanggungjawabnya yang setidak-tidaknya berkaitan dengan 5 (lima) kategori penilaian :

1. Mampu melaksanakan misi, tugas pokok , fungsi dan kewenangan dengan sebaik-sebaiknya;
2. Mampu selalu meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan public;
3. Mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana, SDM, peralatan dan kelengkapan kerja serta berbagai sumberdaya lainnya;
4. Berhasil membangun budaya kerja yang baik;
5. Mampu mengembangkan budaya kompetitif melalui kompetensi yang dimiliki pada era yang penuh persaingan, seperti kreativitas, produktifitas tinggi, profesionalisme yang matang disertai peningkatan daya saing individu dan organisasi;

Dengan Paradigma tersebut, melalui penyusunan Lakip ini, diharapkan mampu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas individu dan organisasi untuk mendukung peningkatan kualitas lembaga, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan output kerja yang baik, dengan demikian diharapkan akan menghasilkan benefit dan pengaruh kinerja pelayanan yang sesuai dengan harapan yang telah ditentukan.

Gambaran Umum Dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD.

1. Struktur Organisasi

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dan dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Dewan membawahi 3 bagian dan & 6 Sub Bagian.

Adapun Tabel Struktur organisasi Sekretariat Dewan Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

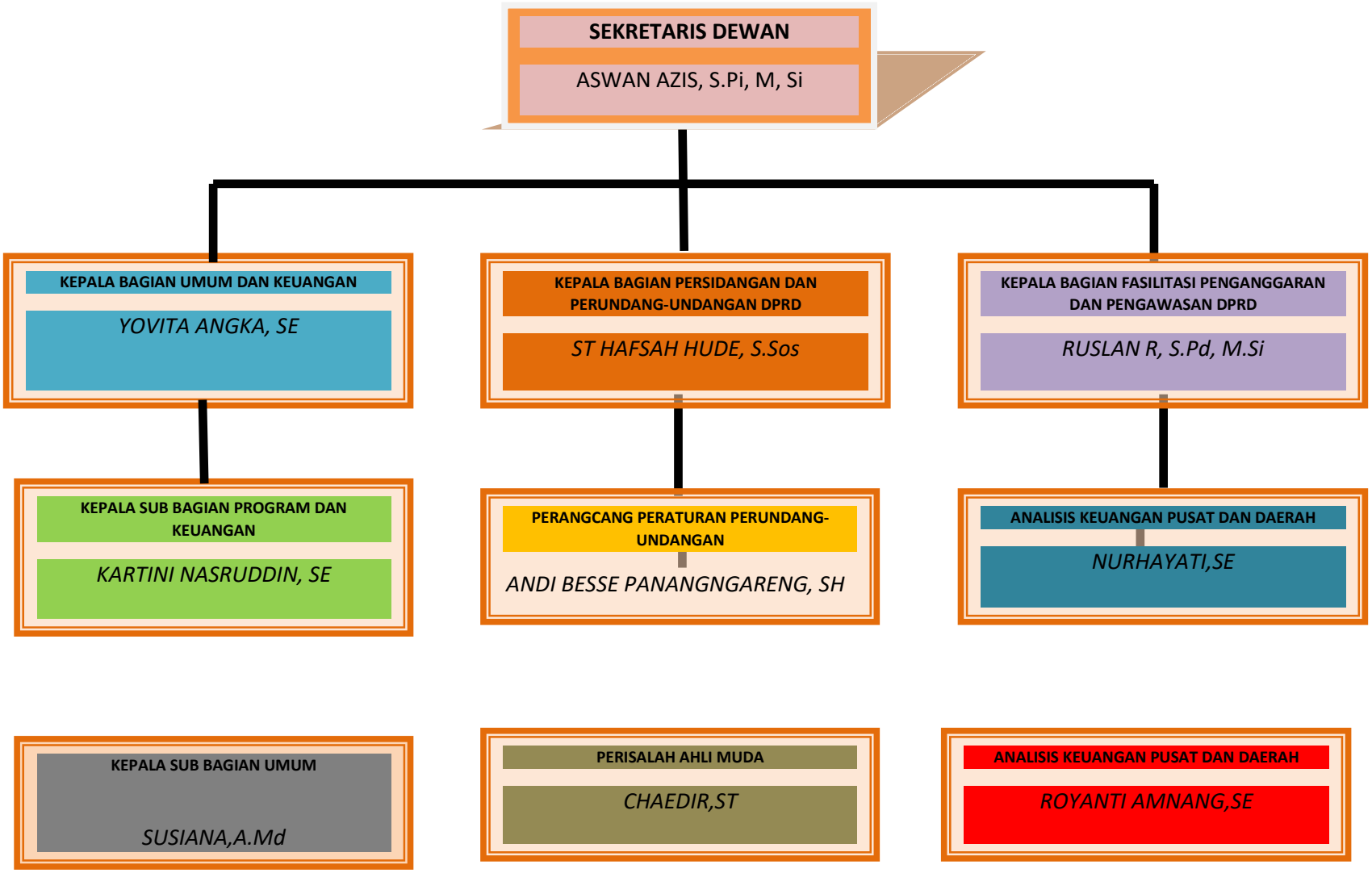
SEKRETARIS DEWAN
ASWAN AZIS, S.Pi, M, Si
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
YOVITA ANGKA, SE
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DPRD
ST HAFSAH HUDE, S.Sos
KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD
RUSLAN R, S.Pd, M.Si
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
KARTINI NASRUDDIN, SE
PERANGCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANDI BESSE PANANGNGARENG, SH
ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
NURHAYATI,SE
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
SUSIANA,A.Md
PERISALAH AHLI MUDA
CHAEDIR,ST
ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
ROYANTI AMNANG,SE

2. Komposisi SDM

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur terdapat berbagai kondisi yang sama seperti Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) lain pada umumnya. Salah satu kondisi yang terjadi di dalam lingkup internal bisa dibagi kedalam berbagai kondisi , diantaranya :

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Desember 2022 berjumlah 79 Orang terdiri :

P N S : 21 Orang

Upah Jasa : 58 Orang

Dari Jumlah pegawai 79 orang yang ada selama tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas sudah cukup memadai.

b. Distribusi Pegawai

Pendistribusian pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur diarahkan memenuhi kebutuhan di tiga bagian, tiap bagian tidak sama jumlahnya,disesuaikan dengan beban kerja tiap-tiap bagian. Dalam pendistribusian Pegawai di Tahun 2022 dirasakan belum optimal, Hal ini dikarenakan masih terjadinya ketidakmerataan pembagian komposisi pegawai di beberapa sub bagian , sementara bagian lain masih dipandang belum mencukupi dari sisi jumlah pegawai,disamping itu perlu adanya penyempurnaan pendistribusian tersebut berdasarkan kebutuhan minimal dalam melayani anggota DPRD Luwu Timur.

c. Komposisi Pegawai

Berdasarkan komposisi jabatan, seluruh jabatan yang ada sudah diisi sesuai dengan jenjang pangkat dan jabatan serta persyaratan administrasi yang seharusnya. Berdasarkan komposisi pegawai, terdapat mayoritas Golongan III yang sudah menduduki jabatan struktural yang berjumlah 2 orang dan dan Fungsional 3 Orang. Beberapa pegawai sudah terakomodir dalam tugas tambahan dalam kegiatan dan

melayani tugas DPRD, misalnya pendamping Komisi sebanyak 6 Orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebanyak 3 Orang, Bendahara Pengeluaran sebanyak 1 Orang, Pengurus barang Sebanyak 1 Orang, dan Penyimpan Barang 1 Orang. Pemetaan komposisi dimaksud sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kompetensi pegawai dalam menunjang kegiatan di Tahun 2022 dan peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.

d. Jenjang Pendidikan Pegawai

- Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur ditunjang dengan tenaga pegawai berdasarkan jenjang pendidikan. Berikut tabel komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur :

- **Tabel 1.1**

Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD / Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	II.a	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
2	II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	II.c	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
4	II.d	-	-	--	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
5	III.a	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1

6	III.b	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
7	III.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	III.d	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
9	IV.a	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
10	IV.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	IV.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Upah Jasa	-	-	3	14	-	1	13	21	-	1	-	2	16	39
	Jumlah													30	49

Grafik.1 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

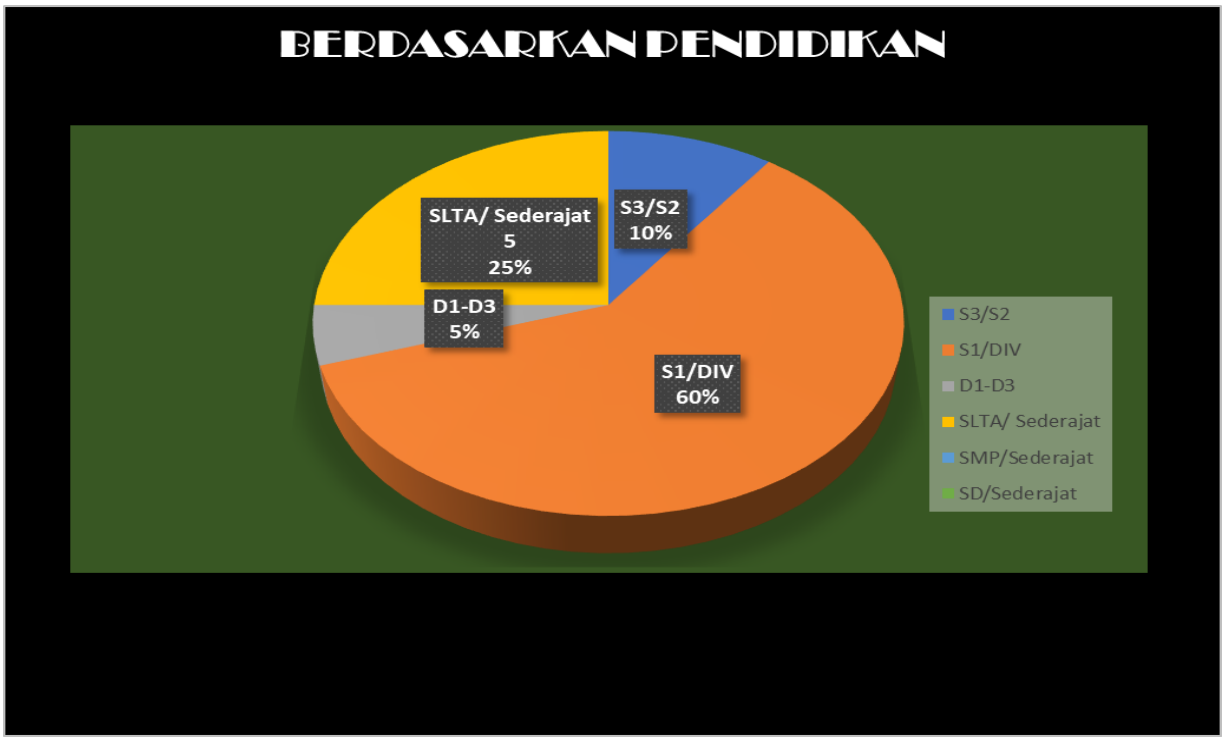

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari data diatas, apabila jenjang pendidikan aparatur berbanding lurus dengan kepangkatan dan jabatan dalam OPD,maka komposisi tersebut telah terbagi secara merata namun masih kurang dalam kuantitas aparatur. Jenjang pendidikan ini

mempengaruhi kinerja tiap orang dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dari sisi keilmuan. Pengalaman kerja masing-masing aparatur menjadi faktor penting untuk memenuhi keterbatasan kuantitas aparatur yang ada. Namun demikian , ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang berupaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan Pasca Sarjana. Hal ini patut didorong oleh kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pegawai Yang akan melanjutkan pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi, agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dan pada akhirnya dapat menunjang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya.

e. Kepangkatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur terbagi kedalam berbagai golongan kepangkatan kepegawaian. Pembagian golongan pegawai dapat dilihat pada

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD / Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IV	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
2	III	-	-	6	6	-	-	-1	-	-	-	-	-	7	6
3	II	-	-	-	-	-	-1	3	-	-	-	-	-	3	1
4	CPNS														
	• Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Upah Jasa	-	-	3	14	-	1	13	21	-	1	-	2	16	39

Grafik.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

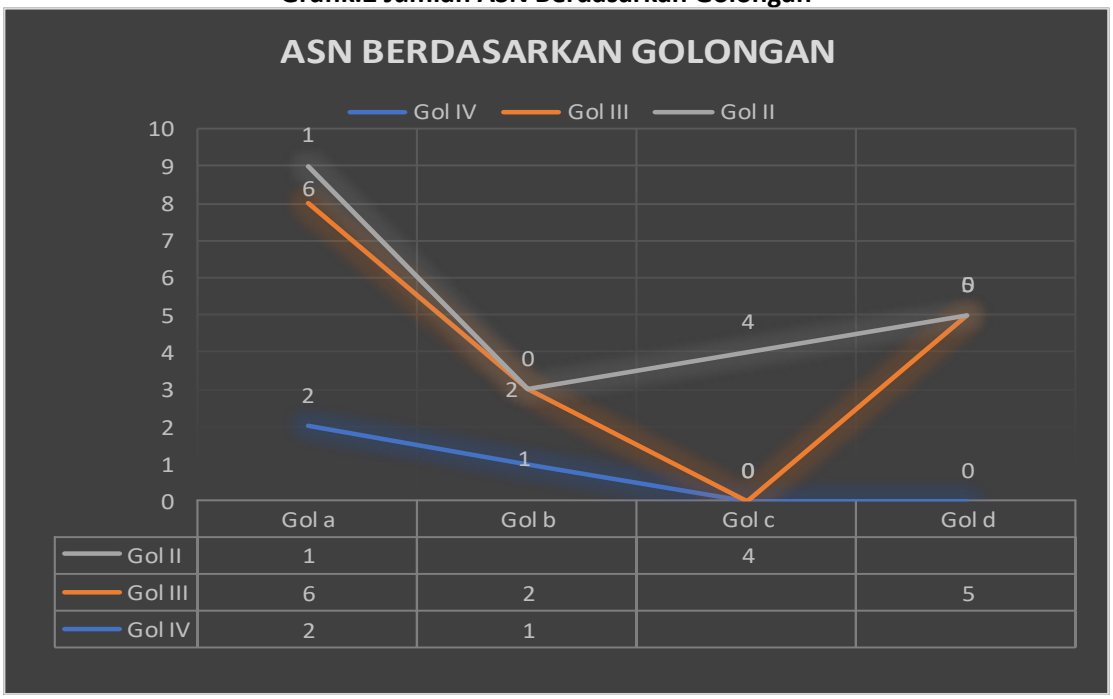

F. Berdasarkan Jabatan

- Esselon II : 1 Orang
- Esselon III : 3 Orang
- Esselon IV : 6 Orang
- Non Esselon : 15 Orang

3. PERAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Staf Ahli maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan kewajiban membantu DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut secretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Isu Strategis Organisasi

Prioritas Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan merupakan factor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan factor-faktor inilah diharapakan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 DPRD Kabupaten Luwu Timur akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain :

1. Pemahaman yang berbeda antara sekretariat DPRD dan DPRD terhadap penerapan peraturan dan perundang-undangan dalam implementasi kerja kegiatan-kegiatan DPRD
2. Inkonsistensi antara rencana kerja dan pelaksanaan kerja DPRD yang sudah disepakati bersama, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai rencana yang menyebabkan tertundanya dan atau tidak terlaksananya kegiatan, yang berimplikasi pada efektifitas dan atau optimalisasi penyerapan anggaran dan kinerja
3. Kebijakan politik yang berkembang di lembaga DPRD secara dinamis ikut mewarnai pengambilan keputusan yang menuntut rencana kerja yang disusun berpotensi mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu
4. Sumber daya ASN yang terbatas dalam kuantitas dibandingkan jumlah kegiatan yang maksimal menuntut ASN mengerjakan pekerjaan lebih secara bersama meskipun dengan lintas bidang yang berbeda dan bukan menjadi tanggung jawab fungsional dan kinerjanya

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

1. RENCANA STRATEGIS

Untuk itu, penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2022-2026 dan IKU Pemerintah Kabupaten Luwu Timur , Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat saasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mencapainya dalam Tahun 2022. Penetapan Kinerja Tahun 2022 dimaksud disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revisi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD kab.Luwu Timur merupakan bagian dari perencanaan daereah, sehingga harus sinkron dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan yang mengacu pada target indikator-indikator yang ditetapkan serta mendukung program-program prioritas Pemerintah Daerah.

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur Tahun 2021-2026 pada hakikatnya merupakan pernyataaan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sitematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian mrlalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran

dan tujuan secara efektif danefisien sehingga kinerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dapat terus ditingkatkan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga Sekretariat DPRD Kab.Luwu timur menetapkan rencana strategi tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam rencana menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta tujuan strategis Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur.

Program Untuk Mencapai Sasaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari Visi dan Misi Kepala Daerah, Visi Misi Kepala Daereah Adalah :

VISI

" LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA"

Dalam rumusan visi ini terkandung makna dari setiap pokok visi adalah sebagai berikut:

- **Berkelanjutan** yang mengandung makna bahwa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu.Demikian juga apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjuta dari apa yang di lakukan hari ini, kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi pelanjut dari generasi yang ada pada saat ini.

- **Lebih maju** mengandung makna apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian – capaian yang menggembirakan di masa lalu tidak harus membuat Luwu Timur menjadi legah, melainkan ini sejainya menjadi motifasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi.

- **Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya** mengandung makna apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebis maju hanya akan mewujud Ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap Langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Sesuai dengan visi dan penjelasannya diatas, untuk mencapainya perlu misi atau cara dalam mewujudkannya. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Fasilitasi/Pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dlam RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan salah satu OPD pelaksanaan misi ke 5 (lima) yaitu :

MISI

" MENCIPTAKAN KEPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK" "

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2021–2026 adalah **:**

Sebagai Penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi , Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merumuskan tujuan,sasaran dan cara mencapainya melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

MISI **:** Meningkatkan Kualitas dan efektifitas Fasilitasi tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD

SASARAN :

1. Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesektariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik,
2. Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan

STRATEGIS :

1. Efektifitas pelayanan bagi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan keperluan tugas Pimpinan dan anggota DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Menyusun agenda rapat-rapat , mempersiapkan , menyelenggarakan dan mendokumentasikan kegiatan tepat waktu
3. Menghitung kebutuhan dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai kemampuan keuangan daerah dan memaksimalkan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada.

4. Memperbanyak pamflet tentang mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat kepada Dewan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Dewan melalui sekretariat DPRD
6. Pelaporan keuangan dam kinerja disusun oleh tim unsur bidang apabila diperlukan dapat menghadirkan narasumber yang kompeten.

KEBIJAKAN

1. Melakukan kerjasama antar pihak eksekutif dengan legislative dalam penyelesaian administrasi;
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antara pihak Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manuasia,

Sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi dari Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur adalah memfasilitasi antar legislatif dan eksekutif baik dari anggarannya maupun kelancaran administrasi yang harus benar-benar profesional dan akuntabel sehingga dapat berjalan maksimal.

a. Program utama :
    a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
b. Program Penunjang :
    a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur yang dinyatakan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator yang berada dalam perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Sekretariat DPRD kab.Luwu Timur dalam peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien,transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD. Penetapan Indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta kegiatan –kegiatan yang mendukung tujuan strategis.

Berdasarkan indikator kinerja dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dan anggaran yang tersedia untuk kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2021, Rencana Kerja Sekretariat DPRD mencakup sasaran berikut indikator kinerjanya dan program serta kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021. Sasaran dan rencana kinerja dilengkapi dengan indikator kinerjanya , sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan , sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Renja merupakan rincian yang sistematis dari program yang dilaksanakan . Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok kinerja kegiatan , yang meliputi Masukan (Inputs), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcomes) berikut Tabel Indikator Kinerja Utama meliputi :

Tabel 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

SEKRETARIAT DPRD

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik.	Persentase Ranperdah yang disetujui bersama	Nilai	(Jumlah Ranperda yang difasilitasi Pembahasannya Dibagi Dengan Jumlah Ranperda yang dijadwalkan untuk dibahas X 100%)	laporan Kegiatan dan laporan Notulen	SETWAN
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Nilai	(Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti di bagi Jumlah Rekomendasi DPRD X 100%)	Laporan Hasil Evaluasi	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.	Nilai Sakip DPRD	%	Jumlah Target Program Dibagi Jumlah Realisasi Program x 100	Laporan Hasil Evaluasi	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap Misi SKPD, yang dirumuskan besifat spesifik,realisasi, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Adapun tujuannya adalah :

- Tujuan

Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapsitas /Kinerja DPRD

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur ,spesifik,rasional dapat dicapai untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun sasaran yaitu :

SASARAN I

Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesektariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik

SASARAN II

Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan

Dalam bab ini juga disajikan capaian indikator Kinerja Utama (IKU), dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2022 dengan berbagai kendala. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 TUJUAN DAN SASARAN,INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KAB.LUWU TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapsitas /Kinerja DPRD		Persentase Kinerja Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	90%	90%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesektariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	90	90	100	100	100%
			Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	90	90	100	100	100%
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani		Nilai SAKIP Sekretariat Dewan	B	BB	BB	A	AA

		Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Nilai Sakip DPRD	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tahun anggaran 2022 terhadap program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang terkait dengan pengelolaan belanja, perubahan tersebut dapat di lihat pada table di bawah ini :

Terkait pagu anggaran mulai dari RKPD/Renja-PD Pokok dan Perubahan, sampai dengan tahapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. APBD Tahun 2022

No	URAIAN	JLH PROGRAM	JLH KEGIATAN	JLH SUB.KEGIATAN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*	*7*
1	RKPD/Renja-PD Pokok	2	18	61	34.952.177.219	1.101.340.767	36.053.517.986
2	APBD/DPA Pokok	2	18	57	30.957.997.900	2.043.500.000	33.301.158.375
5	RKPD PERUBAHAN/Renja - PD Perubahan	2	18	60	33.839.825.900	3.132.607.400	36.972.433.300
6	APBD PERUBAHAN/DPPA	2	18	57	33.839.825.900	3.132.607.400	36.972.433.300

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat penjelasan atas perubahan/pengurangan jumlah program dan kegiatan serta pagu anggaran dari Tahapan RKPD/Renja-PD Pokok ke RKPD/Renja-PD Perubahan sampai dengan Tahapan DPA Perubahan Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- Perubahan pagu anggaran dari RKPD/Renja-PD Pokok ke RKPD/Renja-PD Perubahan sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan Pada beberapa kegiatan mengalami refocussing yaitu :
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Pengadaan Mebel
  2. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya
  3. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.
  4. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.
  5. Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBD Perubahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, maka besaran pagu anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kab. Luwu Timur yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 .

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 36.972.433.300,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Rencana Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TA 2022

No	Belanja	Jumlah Anggaran
1	*2*	*3*
	BELANJA	
1	**BELANJA OPERASI**	**33.839.825.900**
	Belanja Pegawai	14.527.931.669
	Belanja Barang dan Jasa	19.311.894.231
2	**BELANJA MODAL**	**3.132.607.400**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	558.677.400
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.493.930.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.000.000
Total		**36.972.433.300**

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	13.157.283.846,-	90%
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	23.815.149.454,-	100%
TOTAL		**36.972.433.300,-**	**100**

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 36.972.433.300,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya kapasitas lembaga DPRD dengan besaran 63% Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD yaitu sebesar 37% dari total anggaran belanja langsung.

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Perjanjian Kinerja Pegawai ASN dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek kebawah dan kesamping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu , penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati dan dan Pimpinan SKPD atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta daya yang tersedia.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2022.

1. Capaian Indikator Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja dari sasaran yang terdiri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja beserta target sasaran dan program yang tertuang dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi dan perjanjian kinerja Tahun 2022 berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan Organisasi.

Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan PerjanjianKinerja tahun 2022 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Sekretaris Dewan Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	90%	85,19%	94,66%
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%

Data Semester II

SASARAN STRATEGIS I

Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik

Grafik .2 persentase Fasilitasi pembahasan Ranperda

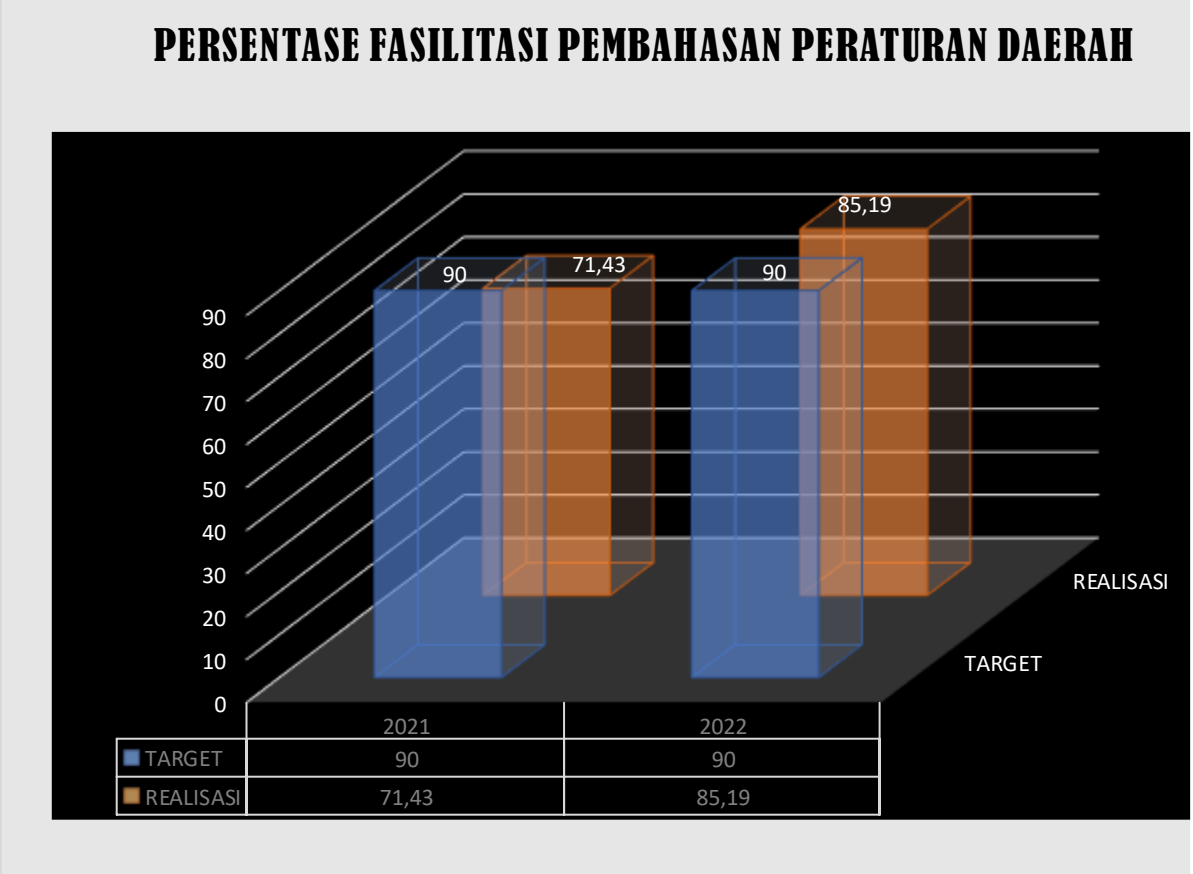

Grafik 3

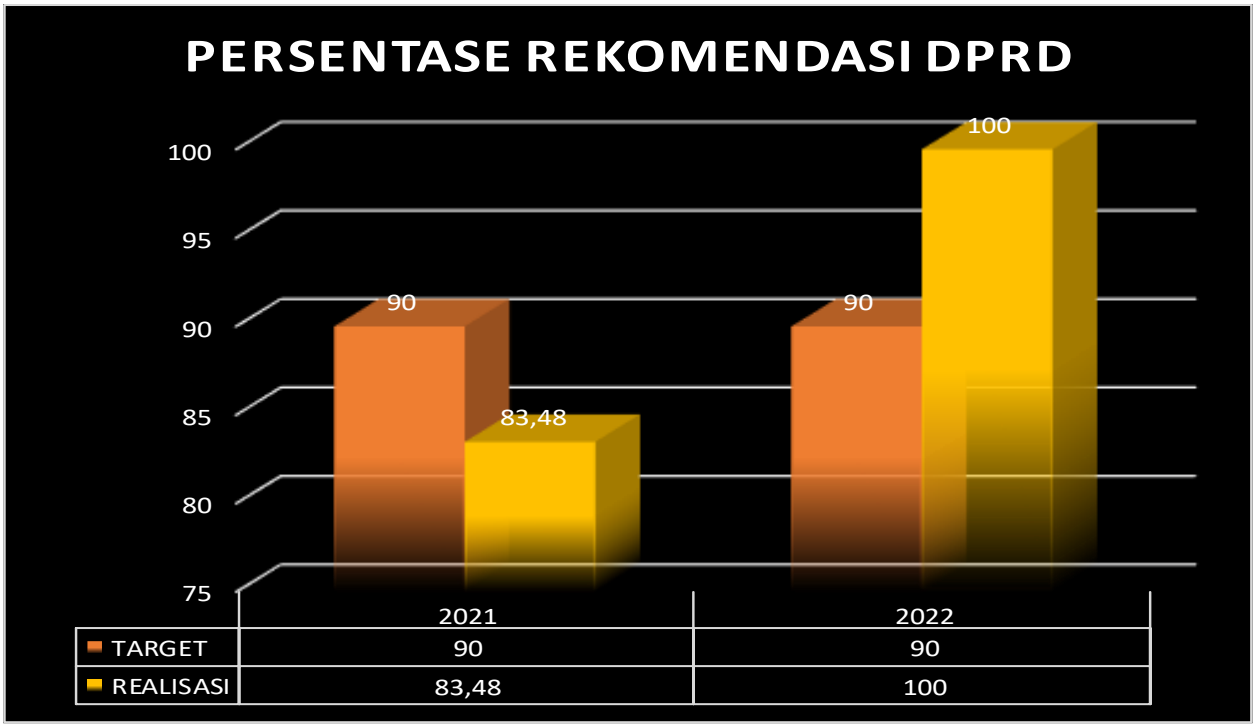

Dari 2 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa pencapaian indikator Pertama yaitu Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah terealisasi sebesar **85,19** Persen dan Jumlah Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti terealisasi sebesar **100** persen.

Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

2 Analisis Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2022 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pertama **"Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik"** tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Capaian Kinerja Sasaran ke -1 Indikator -1

Sasaran I	**Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik**		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Faselitasi Pembahasan Peratutran Daerah	90%	85.19%	94,66%

1. Analisis Capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2022

- **Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah**
  - Penjelasan atas pencapaian untuk indikator yang Pertama yaitu dari Persentase ranperda yang disetujui bersama terealisasi sebesar dengan **85,19 persen** capaian sebesar **94,66 persen,** untuk memperoleh nilai indikator Pertama ini diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Ranperda yang difasilitasi Pembahasannya Dibagi Dengan Jumlah Ranperda yang dijadwalkan untuk dibahas X 100%. Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada tahun 2022 berdasarkan indikator sasaran dalam Renstra 2021-2026 adalah 90% dan terealisasi

85,19%, dengan persentase capaian 94,66%. Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja tdk mencapai target.

- Penjelasan atas pencapaian untuk indikator yang Pertama yaitu

jumlah ranperda yang di targetkan untuk difasilitasi sebanyak 27 Ranperda dan yang terealisasi sebanyak 23 Ranperda Yang terdri dari :

1. Ranperda Kepemudaan;
2. Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Ranperda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Ranperda BPD;
5. RTRW;
6. PLP2B;
7. Ranperda Pernikahan anak;
8. Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Berisiko;
9. Persetujuan Bangunan Gedung;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
11. Perseroan Terbatas Lutim Gemilang;
12. SPALD;
13. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
14. Perubahan atas perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa;
15. Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan Umum daerah air minum Waernami;
16. Ranperda Etika Kepariwisataan;
17. Naskah Hari Jadi Luwu Timur;
18. Perubahan APBD Tahun 2022;
19. APBD Pkok Tahun 2023;
20. Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021;
21. Etika Pemerintahan;

22. Penanaman Modal ;

23. Ranperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Grafik. 5. Data Ranperda

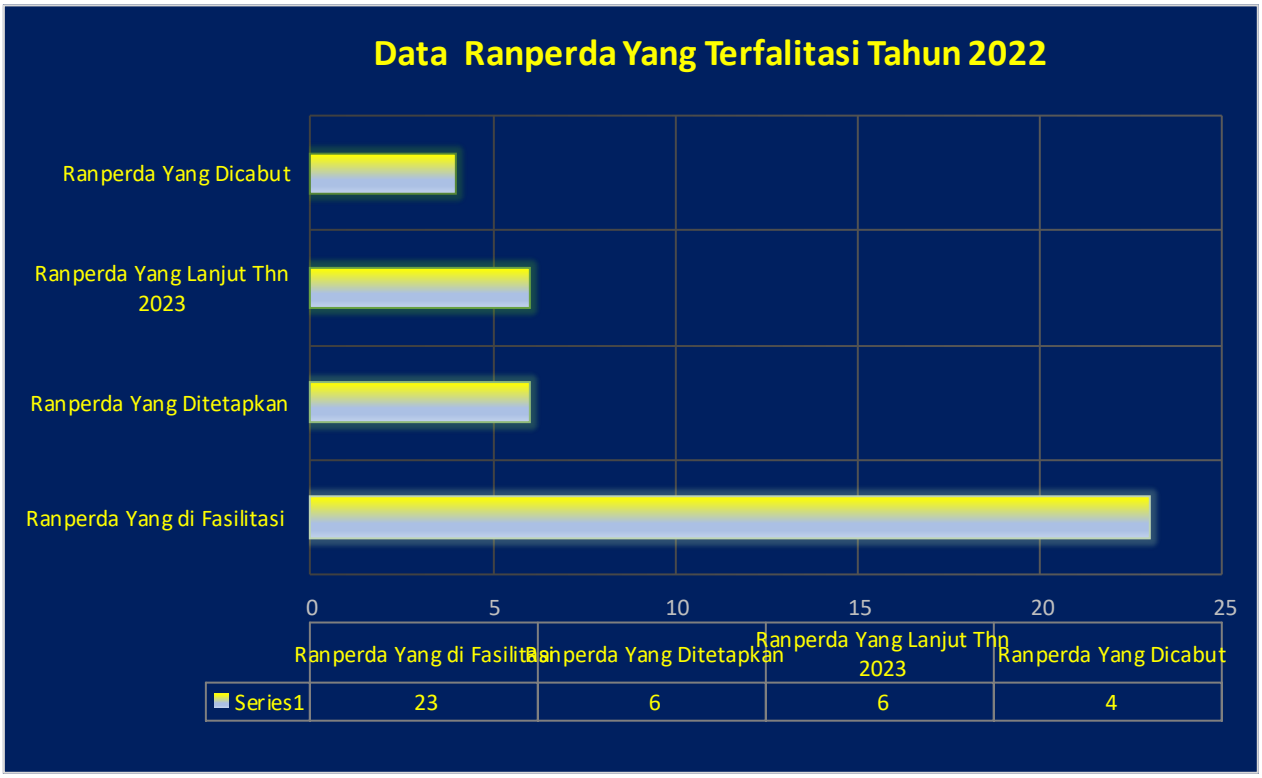

Sumber Data Bagian Persidangan

- Adapun Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu : Program Dukungan Pelaksanan Tugas dan Fungsi DPRD Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD meliputi 2 Sub Kegiatan yaitu:
    1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,
    2. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan,
- Peningkatan Kapasitas DPRD, yang terdiri 4 sub kegiatan yaitu;
    1. Pendalaman Tugas DPRD'
    2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim ahli;
    3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;

4. Penyusunan Program Kerja DPRD

- Pembahasan Kerjasama Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi;

- Fasilitasi tugas DPRD terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.

- Hambatan/ kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat hambatan dan kendala yaitu :

- Kurangnya Koordinasi antara Sekretariat DPRD dan DPRD sekaitan penyusunan Jadwal kegiatan;
- Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing SDM pelaksana dan juga penetapan target kinerja yang belum sesuai ;
- Terjadinya mutasi Jabatan yang menyebabkan

- Solusi

- Meningkatkan sumber daya manusia pada Lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar wawasan dari kinerja dapat dirasakan manfaatnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD.

- Efisiensi Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan keterbatasan tenaga yang tersedia menjadi hambatan untuk meningkatkan capaian kinerja.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Grafik. 6 Kegiatan Bagian Persidangan

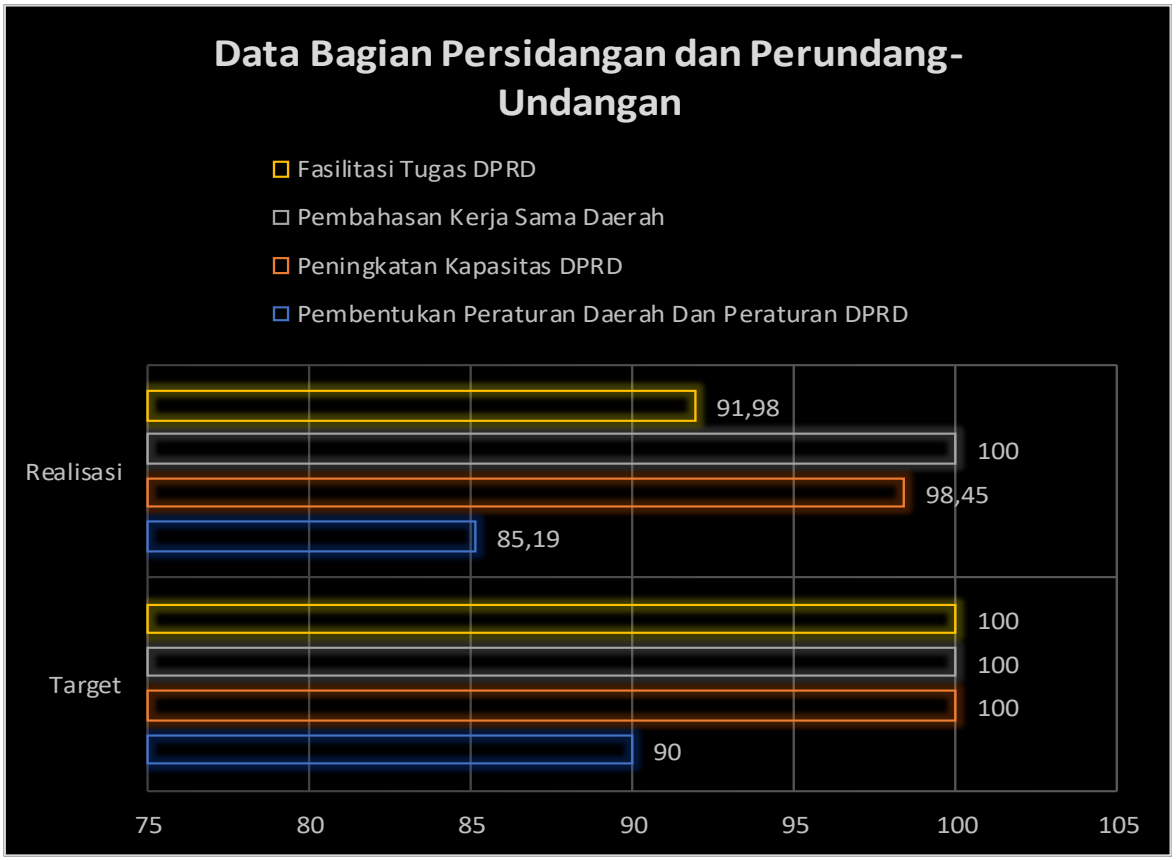

Sumber data bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dari Tahun 2022

❖ **Tabel.3.3**

❖ **Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	90%	85,19%	94,66%	Rp 7.674.282.614	Rp 7.378.650,862	96,15 %
Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	90%	98,15%	97,78%	Rp 7.674.282.614	Rp 6.574.287.428	96,15%

Tabel. 3.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	94,66%	96,15 %	0%

- Pencapaian sasaran strategis Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan Pada Indikator Pertama Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah sebesar 94,66% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,15%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 0%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi Belanja} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\% \right]$$

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- Kebutuhan masyarakat untuk memahami peraturan Daerah ;
- Informasi kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dalam media cetak merupakan salah satu bentuk pengembangan publikasi kegiatan aAat Kelengkapan Dewan melalui media cetak dan website.

Tabel. 3.5

Capaian Kinerja Sasaran ke -1 Indikator -2

Sasaran I	**Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik**		
Indikator 2 Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%

3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sasaran serta Program/Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Garafik .7. Kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

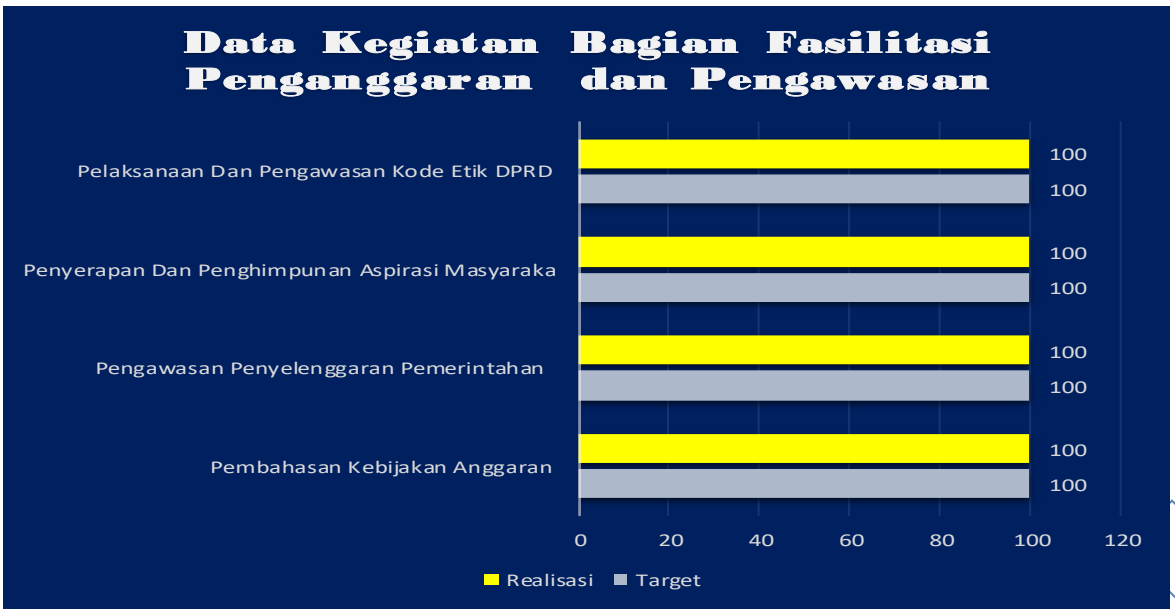

- Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegaitan yang mendukung sasaran ini yaitu : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub kegiatan- sub kegiatan sebagai berikut :
  - Pembahasan Kebijakan Anggaran meliputi 5 sub kegiatan yaitu:
    1. Pembahasan KUA dan PPAS
    2. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
    3. Pembahasan APBD
    4. Pembahasan APBD Perubahan
    5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
  - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi 5 sub kegiatan yaitu:
    1. Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
    2. Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur
    3. Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian
    4. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
    5. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
  - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat meliputi 2 sub kegiatan yaitu;
    1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
    2. Pelaksanaan Reses
  - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD meliputi 1 sub kegiatan yaitu;
    1. Pengawasan Kode Etik DPRD

- Hambatan/ kendala

  Dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat hambatan dan kendala yaitu :

  - Masih kurangnya pemahaman SDM aparatur dibidang indikator kinerja yang

terukur dan outcome dari masing-masing kegiatan;

- Kurangnya pemehaman Aparatur tentang output belanja secara detail merupakan parameter unuk menentukan kegiatan yang dilaksanakan berkinerja;

- Solusi
  - Mengoptimalkan pelayanan terhadap kegiatan DPRD, Jajaran Aparatur Sekretariat DPRD Kab.Luwu Timur dapat memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan pada tahun berikutnya.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel.3.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik	Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11 %	Rp 6.140.866.840	Rp 6.018.068.009	98,00 %
Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	90%	98,15%	109,05%	Rp 6.140.068.009	Rp 6.018.068.009	98.00%

Tabel. 3.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik	Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	111,11%	98,00 %	13,11%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik sebesar 111,11% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,00%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 13,11%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi Belanja} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\% \right]$$

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- ❖ Terlaksananya Fungsi Pengawasan dan Penganggaran yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD ;
- ❖ Tersedianya anggaran untuk masing-masing kegiatan;
- ❖ Terlaksananya semua kegiatan pembahasan yang terdapat pada Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi;

Tabel. 3.5

Capaian Indikator Kinerja Program ke -1

Program/ Kegiatan/sub.kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	**Terlaksananya Kegiatan Legislasi yang difasilitsi**	**Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi**	**90%**	**98,15%**	**109,05**
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	**Terlaksananya Pembahasan Ranperda yang disetujui untuk d perdakan**	**Jumlah Ranperda yang telas dibahas dan disetujui untuk diperdakan**	**54 Ranperda**	**46 Ranperda**	**85,19%**
Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang diselenggarakan	27 ranperda	24 ranperda	88,89%
Sub.Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang difasilitasi	27 Ranperda	23 Ranperda	85,19%
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Nota Kesepakatan dan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**7 dok**	**7 dok**	**100%**
Sub.Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan yang disetujui bersama	2 dok	2 dok	100%
Sub.Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan yang disetujui bersama	2 dok	2 dok	100%
Sub.kegiatan Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah ranperda yang disetujui	1 dok	1 dok	100%
Sub.kegiatan Pembahasan Perubahan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah ranperda Perubahan yang disetujui	1 dok	1 dok	100%
Sub.kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah ranperda yang disetujui	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Terlaksananya Pengawasan dan penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**25 dok**	**25 dok**	**100%**
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Dokumen)	4 dok	4 dok	100%
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Infrastruktur	4 dok	4 dok	100%
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 dok	4 dok	100%
Pengawasan Tindaklanjut Hasil hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Jumlah Rekomendasi LHP yang ditindak lanjuti (Rekomendasi)	3 dok	3 dok	100%
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	10 rekomendasi	10 rekomendasi	100%
Peningkatan Kapasitas DPRD	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**100%**	**100%**
Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Bimbingan Tehknis DPRD	Jumlah Bimtek yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD (kali)	3 kali	3 kali	100%

Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terlaksananya Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar dan Tim Ahli yang disediakan (Orang)	3 orang	3 orang	100%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlsedianya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6 orang	6 orang	100%
Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Laporan Program Kerja DPRD (Dokumen)	1 dok	1 dok	100%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	**Terlaksananya Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase meningkatnya Peran serta DPRD dalam menindaklanjuti masalah Pembangunan dan terwujudnya Jaringan Aspirasi masyarakat**	**100%**	**100%**	**100%**
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok DPRD	Jumlah pokok-Pokok Pikiran yang terserap (kali)	3 kali	3 kali	100%
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses yang difasilitasi	Jumlah Reses Perseorangan yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD (Kali)	3 kali	3 kali	100%
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	**Terlaksananya Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Penegakan Pelanggaran Kode Etik**	**3 kali**	**3 kali**	**100%**
Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode etik DPRD (kali)	3 kali	3 kali	100%
Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah (Jenis)**	**5 jenis**	**5 jenis**	**100%**

Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kegiatan yang dipublikasikan (Jenis)	5 Jenis	5 Jenis	100%
Fasilitasi Tugas DPRD	**Terlaksananya Fasilitasi Tigas DPRD**	**Jumlah Fasilitasi DPRD**	**127 kali**	**127 kali**	**100%**
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan ANggota DPRD yang dilaksanakan (Kali)	80 kali	80 kali	100%
		Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang dilaksanakan	35 kali	35 kali	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus yang difasilitasi (Kali)	12 kali	12 kali	100%

Grafik.8. Capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

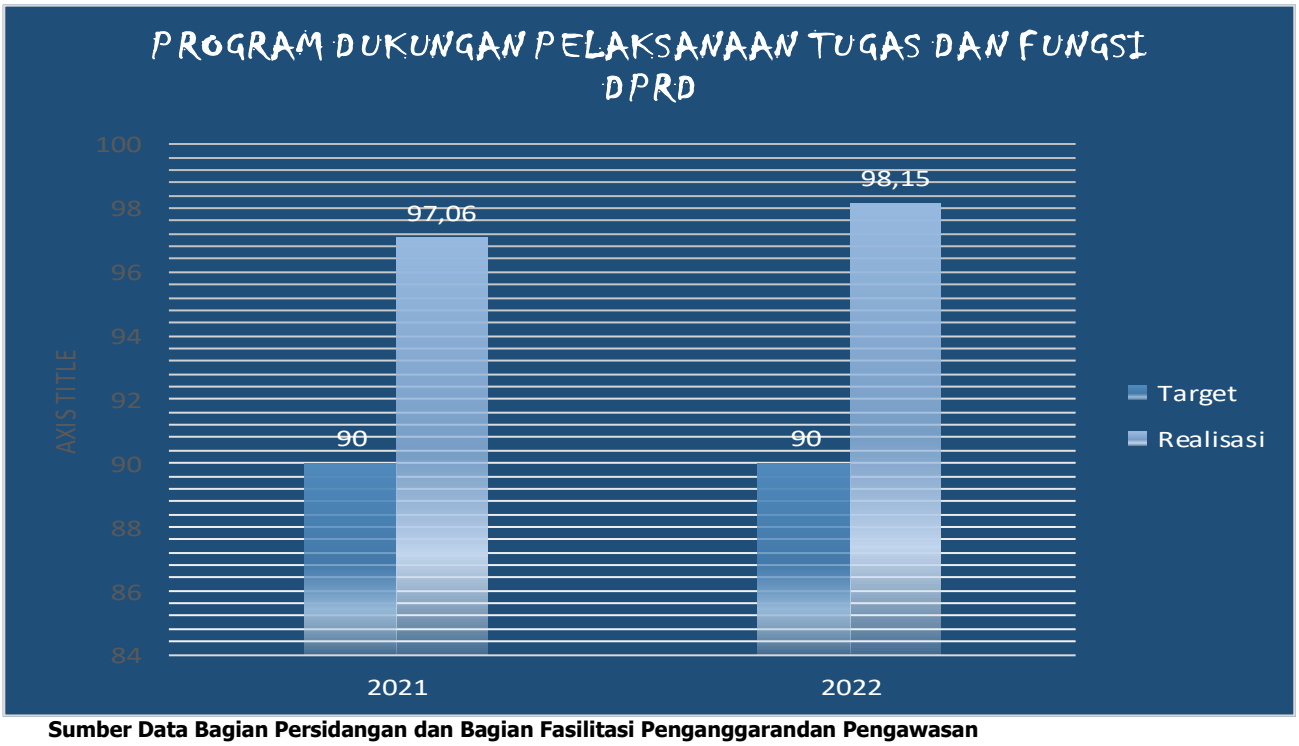

Sumber Data Bagian Persidangan dan Bagian Fasilitasi Penganggarandan Pengawasan

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

✓ Sasaran program **"Terlaksananya Kegiatan Legislasi yang difasilitsi"** dengan indikator kinerja program yaitu **Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi**.

Target indikator program tahun 2022 adalah 90% dengan realisasi 98.15% dengan capaian 109,05%. Capaian yang melebihi target tidak lepas dari dukungan pihak-pihak terkait dan ketersediaan dana.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program Terlaksananya Kegiatan Legislasi yang Difasilitasi adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- **Indikator Program adalah persentase kegiatan legislasi yang difasilitasi (%) dengan target 90% dan realisasi 96,97% dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 13.815.149.454,- Realisasi Rp. 13.396.718.871,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 418.430.583,- Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini sebagai berikut:**
  - **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah persentase pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD dengan target 54 ranperda dan terealisasi 46 ranperda dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.323.664.461,00 dan realisasi Rp. 3.262.511.482,00 dengan persentase realisasi 98,13%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

    a.Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

    Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah kajian perundang-undangan yang diselenggarakan dengan anggaran Rp. 470.868.075 dan terealisasi Rp. 460.480.965 atau sebesar 97,79%.

    b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

    - Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, bertujuan untuk menghasilkan perda sebagai pedoman pemerintah daerah kab.luwu timur menjalankan fungsi eksekutif untuk menatakelola pemerintahan, menatakelola

sumber daya dan menata kelola prilaku budaya untuk kesejahteraan masyarakat Kab.Luwu Timur.

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah ranperda yang dibahas dengan target 27 ranperda dan terealisasi 23 Ranperda serta capaian kinerja sebesar 85,19%. Anggaran Rp. 2.852.796.386 dan terealisasi Rp. 2.801.030.517 atau sebesar 98.19%

- **Pembentukan Kebijakan Anggaran. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah jumlah nota kesepakatan dan dokumen pembahasan kebijakan anggaran dengan target 7 nota Kesepakatan dan terealisasi 7 nota kesepakatan. Anggaran Rp. 810.351.150 dan menyerap anggaran sebesar Rp. 760.120.000,00 dengan persentase realisasi 93,80%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

  a. Pembahasan KUA dan PPAS

     Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah nota kesepakatan yang disetujui bersama dengan target 2 nota kesepakatan dan terealisasi 2 nota kesepakatan serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 47.585.470 dan terealisasi Rp. 46.924.720 atau 98.61%

  b. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS

     Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah nota kesepakatan yang disetujui bersama dengan target 2 nota kesepakatan dan terealisasi 2 nota kesepakatan serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 36.899.580 dan realisasi Rp. 36.799.580 atau 99,73%

  c. Pembahasan APBD

     Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah ranperda yang disetujui bersama dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 268.746.500 dan realisasi Rp. 265.010.900 atau sebesar 98.61%

  d. Pembahasan APBD Perubahan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah ranperda perubahan yang disetujui bersama dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 263.734.800 dan realisasi Rp. 220.484.200

e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah ranperda pertanggungjawaban APBD yang disetujui bersama dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 193.384.800 dan Realisasi 190.900.600,- atau sebesar 98,72%

- **Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 25 dokumen dan terealisasi 25 dokumen Tu 100 % dengan Anggaran Rp. 3.814.477.274,- menyerap anggaran sebesar Rp. 3.794.317.609,00 dengan persentase realisasi 99,47%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum dengan target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran 1.147.199.601 dan realisasi Rp. 1.140.820.906 atau sebesar 99,44%.

b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dengan target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 1.184.588.101 dan Realisasi Rp. 1.183.931.018 atau sebesar 99,94%

c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian dengan target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 1.181.670.601 dan Realisasi Rp. 1.172.443.685 atau sebesar 99,22%

d. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

   Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti dengan target 3 rekomendasi dan terealisasi 3 rekomendasi serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 185.733.646 dan Realisasi Rp. 182.216.000 atau sebesar 98,11%.

e. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

   Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi yang dihasilkan dengan target 10 rekomendasi dan terealisasi 10 rekomendasi serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 115.285.325 fdan Realisasi Rp. 114.906.000 atau sebesar 99,67%.

- **Peningkatan Kapasitas DPRD. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja peningkatan kapasitas DPRD dengan target 90% dan realisasi 100% dengan Anggaran 1.840.061.750 menyerap anggaran sebesar Rp. 1.633.603.782,00 dengan persentase realisasi 88,78%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

  a. Pendalaman Tugas DPRD

     Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah bimtek yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD dengan target 3 kali dan terealisasi 3 kali serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 1.498.310.550 dan Realisasi Rp. 1.343.062.582 atau sebesar 89,64%

  b. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

     Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah tim pakar dan tim ahli yang disediakan dengan target 3 orang dan terealisasi 3 orang serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 85.831.200 dan Realisasi Rp. 35.971.200 atau 41,91% . Tidak mencapai target dikarenakan Terdapat belanja jasa yaitu belanja honorarium Nasrasumber, Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia Sebesar 42,000,000

  c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah tim ahli fraksi dengan target 6 orang dan terealisasi 6 orang serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 252.000.000 dan realisasi 252.000.000 atau 100%.

d. Penyusunan Program Kerja DPRD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan program kerja DPRD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 3.920.000 dan realisasi Rp. 2.570.000,- atau 65,56%. Sub Kegiatan ini tidak mencapai targret dikarenakan Terdapat barang pakai habis yaitu belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 1,350,000,-

- **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah persentase meningkatnya peran serta DPRD dalam menindaklanjuti masalah pembangunan dan terwujudnya jaringan aspirasi masyarakat dengan target 100% dan realisasi 100% dengan Anggaran Rp. 1.464.419.606 menyerap anggaran sebesar Rp. 1.413.965.400,00 dengan persentase realisasi 96,55%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pokok-pokok pikiran yang terserap dengan target 3 kali dan terealisasi 3 kali serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 21.102.355 dan menyerap anggaran Rp. 19.026.400 atau 90.16%.

b. Pelaksanaan Reses

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah reses perseorangan yang dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD dengan target 3 kali dan terealisasi 3 kali serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 1.443.317.251 dan realisasi Rp. 1.394.939.000 atau 96,65%

- **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah jumlah penegakan pelanggaran kode etik dengan target 3 kali dan realisasi 3 kali 100% dengan Anggaran Rp. 51.618.810 menyerap anggaran sebesar Rp. 49.665.000 dengan persentase realisasi 96,21%. Pada dasarnya anggaran belanja**

disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Kode Etik DPRD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pengawasan kode etik DPRD dengan target 3 kali dan terealisasi 3 kali serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 51.618.810 dan realisasi 49.665.000 atau 96,21%

- **Pembahasan Kerja Sama Daerah. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah jumlah pembahasan kerja sama daerah dengan target 5 jenis dan realisasi 5 jenis atau 100% dengan Anggaran 1.006.675.000 dan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.003.495.000,00 dengan persentase realisasi 99,68%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Kegiatan komunikasi,publikasi dan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD bertujuan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan pimpinan dan anggota dewan melalui media cetak maupun elektronik

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan yang dipublikasikan dengan target 5 jenis dan terealisasi 5 jenis serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 1.006.675.000 dan realisasi Rp. 1.003.495.000 atau 99,68%.

- **Fasilitasi Tugas DPRD. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi tugas DPRD dengan target 127 kali dan realisasi 127 kali atau 100% dengan Anggaran Rp. 1.503.881.403 menyerap anggaran sebesar Rp. 1.480.040.598,00 dengan persentase realisasi 98.41%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan dengan target 80 kali dan terealisasi 80 kali serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 1.480.779.939 dan realisasi Rp. 1.456.939.133 atau 98.39%.

b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan tugas bamus yang difasilitasi dengan target 12 kali dan terealisasi 12 kali serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 23.101.465 dan realisasi Rp. 23.101.465 atau 100%

Sasaran Strategis 2

Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Nilai Sakip DPRD

Tabel.3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Nilai Sakip DPRD	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	100%	95%	95%

Grafik.9. Indikator Capaian Kinerja Sasaran 2

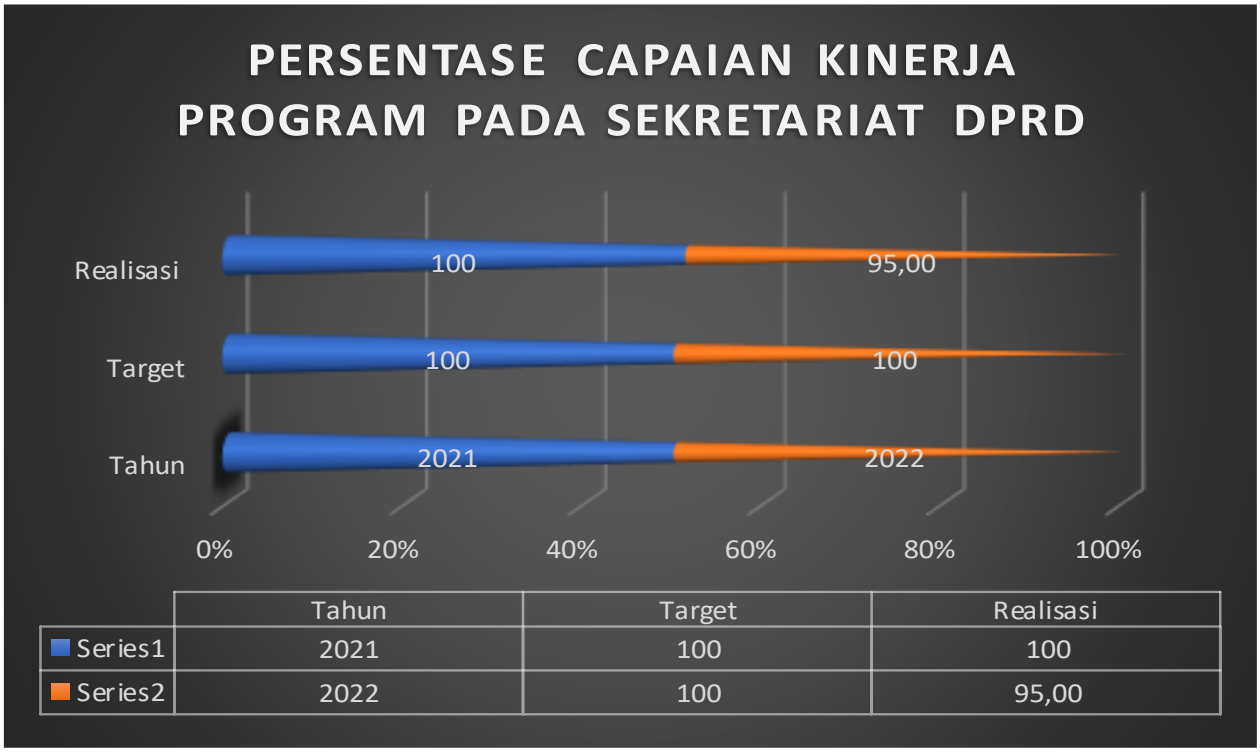

2. **Analisis Capaian kinerja Sasaran 2 tahun 2022**

Dengan melihat grafik .9. perbandingan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 maka capaian kinerja mengalami penurunan karena adanya sub kegiatan yang tidak mencapai target yang dijadwalkan tepat waktu dan pelaksanaan Program/Kegiatan ini dilaksanakan di bagian Umum dan Keuangan, dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan diprioritaskan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- **Persentase Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD**

Penjelasan atas pencapaian untuk indikator yaitu dari Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD terealisasi sebesar dengan **95 persen** capaian sebesar **95 persen,** untuk memperoleh nilai indikator ini diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Target Program Dibagi Jumlah Realisasi Program x 100

- Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada tahun 2022 berdasarkan indikator sasaran dalam Renstra 2021-2026 adalah 100% dan terealisasi 95%, dengan persentase capaian 95%. Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja tdk mencapai target.

Berkaitan dengan ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 1 (satu) program, 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 10 kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   g. Fasilitas Kunjungan Tamu
   h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

c. Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD

10. Layanan Administrasi DPRD

a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

- Hambatan/ kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat hambatan dan kendala yaitu :

- Terdapat Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah dan Belanja Modal Penataan Halaman Rujab Ketua DPRD DiBatalkan karena waktu yang tersedia untuk pekerjaan tersebut tidak memungkinkan;
- Sulit menyesuaikan agenda kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD dengan jadwal Medical Check-Up;
- Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing SDM pelaksana dan juga penetapan target kinerja yang belum sesuai ;

- Terjadinya mutasi Jabatan yang menyebabkan

- Solusi

  - Meningkatkan sumber daya manusia pada Lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar wawasan dari kinerja dapat dirasakan manfaatnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD.

- Efisiensi Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan keterbatasan tenaga yang tersedia menjadi hambatan untuk meningkatkan capaian kinerja.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Grafik. 10. Kegiatan Penunjang Indikator Sasaran Ke-2

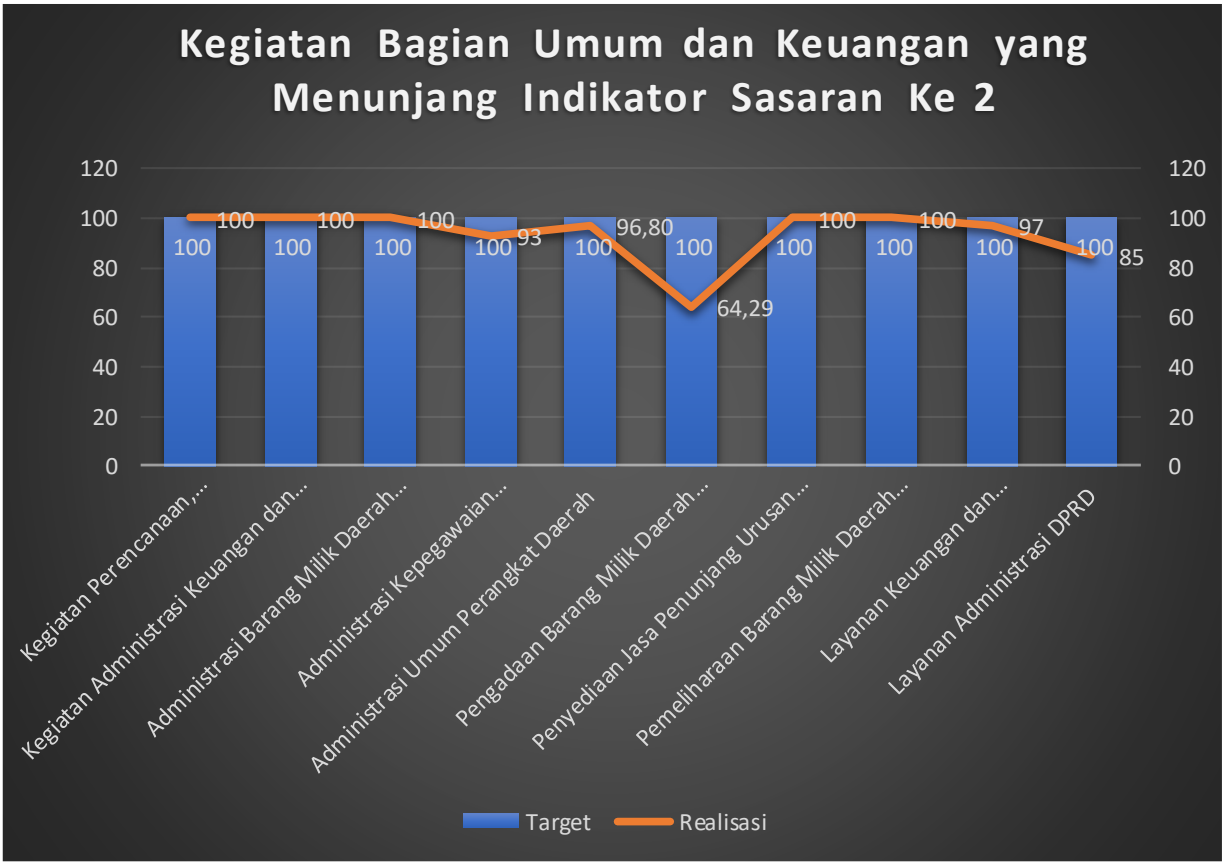

Sumber Data Bagian Umum dan Keuangan Thn 2022

Tabel. 3.8

Capaian Kinerja Sasaran ke -2 Indikator -1

Sasaran I	**Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Nilai Sakip DPRD**		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	100%	95%	95%

❖ **Tabel.3.9**

❖ **Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Nilai Sakip DPRD	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	100%	95%	95%	Rp 23.157.283.846	Rp 21.862.940.229	95,37 %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat daerah Berjalanan Sesuai Standar	100%	95%	95%	Rp 23.157.283.846	Rp 21.862.940.229	95,37 %

Tabel. 3.10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Nilai Sakip DPRD	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	95%	95,37 %	0,%

Pencapaian sasaran strategis 2 Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Nilai Sakip DPRD sebesar 95% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,37%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 0,%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi Belanja} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\% \right]$$

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- ❖ Tersedianya anggaran untuk masing-masing kegiatan;
- ❖ Terlaksananya semua kegiatan yang terdapat pada Program dukungan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

Tabel. 3.11 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/ Kegiatan/sub.kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksanya penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)**	**100%**	**95,00%**	**95,00%**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat wakt**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	**100**	**100**	**100%**
	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Terbayarkannya Tenaga Upah jasa Administrasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Upah jasa Administrasi Perencanaan Perangkat Daerah yang terbayar	2 orang	2 orang	100%
	Sub.Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub.Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusun nya Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub.Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)**	**100%**	**100%**	**100%**

	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	21 Orang	21 Orang	100%
	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terbayarkannya Honorarium PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran	Jumlah Honorarium PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran yang terbayarkan	2 orang	2 orang	100%
		Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
		Terbayarkannya Tenaga Upah jasa Administrasi Keuangan setiap bulannya	Jumlah Tenaga Upah jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan	2 orang	2 orang	100%
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pterlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100%**
	Sub.Penatausahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 dok	4 dok	100%
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersusunnya KepegawaiaKepegawaian Perangkat Daerah**	**Pesentase KepegawaiaKepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**93%**	**100%**
	Sub. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 dok	2 dok	100%
	Sub. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	18 Orang	90%

1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat DaeraPersentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah**	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat DaeraPersentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**96,80**	**96,80**
	Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Jns)	9	9	100
	Sub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (unit)	5	5	100
	Sub. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Jns)	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Jns)	2	2	100
	Sub. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik yang disediakan (jns)	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan (jns)	2	2	100
	Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (jns)	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (jns)	2	2	100
	Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terepenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Exp)	1835	1754	95,59
	Sub. Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Tamu yang difasilitasi	Jumlah Tamu yang difasilitasi (orang)	700	700	100
	Sub. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	120	114	95
		Terbayarkannya gaji Upah Jasa Sopir Yang setiap bulannya	Jumlah Upah Jasa Sopir Yang Terbayarkan (Orang)	6	6	100%

1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)**	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)**	**100%**	**64,29%**	**64,29**
	Sub. Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Mebel yang diadakan	Jumlah Mebel yang diadakan (Unit)	3	3	100
	Sub. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan(Unit)	5	3	60
	Sub. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kan-tor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kan-tor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	3	3	100
	Sub. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	3	0	0
1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)**	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)**	**100%**	**100%**	**100**
	Sub. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan (surat)	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan (surat)	2400	2400	100
	Sub. Penyediaan Jasa KPenyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya Rekening Bu-lanan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Jumlah Rekening Bu-lanan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik yang terbayarkan (Rek)	36	36	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Tenaga Jasa Pengamanan	Jumlah Tenaga Jasa Pengamanan yang terbayarkan (orang)	1	1	100
		Terbayarkannya Tenaga Jasa Pelayanan	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan yang terba-yarkan (orang)	21	21	100
1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintaha n yang terpelihara dengan baik ('%)**	**Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintaha n yang terpelihara dengan baik ('%)**	**100%**	**100%**	**100%**

	Sub. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan dipelihara yang dibayarkan Pajak-nya (unit)	Jumlah Kendaraan Di-nas Perorangan atau Kendaraan dipelihara yang dibayarkan Pajak-nya (unit)	11	11	100
	Sub. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	203	183	90,15
	Sub. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang diasur-ansikan (Unit)	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasur-ansikan (Unit)	6	6	100
	Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliha-ra/direhabilitas (unit)	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliha-ra/direhabilitas (unit)	3	3	100
	Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliha-ra/direhabilitasi (unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kan-tor atau Bangunan Lainnya yang dipeliha-ra/direhabilitasi (unit)	3	3	100
1.9	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (%)**	**Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (%)**	**100%**	**97,00%**	97
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Bulanan Gaji dan Tunjangan Pimpi-nan dan Anggota DPRD yang terbayarkan (orang)	Jumlah Bulanan Gaji dan Tunjangan Pimpi-nan dan Anggota DPRD yang terbayarkan (orang)	30	30	100
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Per-lengkapannya yang diadakan (orang)	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Per-lengkapannya yang diadakan (orang)	30	30	100
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan (orang)	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan (orang)	17	4	23,53
1.10	**Layanan Administrasi DPRD**	**Terlaksananya layanan administrasi DPRD ('%)**	**persentase layanan administrasi DPRD ('%)**	**100%**	**85%**	**85**
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat dan Konsultasi DPRD yang diselenggarakan (kali)	Jumlah Rapat dan Kon-sultasi DPRD yang diselenggarakan (kali)	4	2	50
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya Bahan/Perlengkapan Ru-mah Tangga yang dise-diakan (unit)	Jumlah Ba-han/Perlengkapan Ru-mah Tangga yang dise-diakan (unit)	3	3	100

- Realisasi Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Indikator Program adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) dengan target 100% dan realisasi Kinerja 95% dengan Anggaran Rp. 23.157.283.846 menyerap anggaran sebesar Rp. 21.862.940.229,00 atau 94,41% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.385.838.617,00. Adapun kegiatan yang mendukung capaian program ini sebagai berikut:**
  - **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dengan target 16 dokumen dan terealisasi 16 dokumen atau 100% dengan Anggaran Rp. 71.224.518 menyerap anggaran sebesar Rp. 65.788.392,00 dengan persentase realisasi 89,84%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

    Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Dengan Anggaran Rp. 30.738.625 dan Realisasi Rp. 28.404.337 atau 92.41%

    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

    Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen rka-skpd yang disusun tepat waktu dengan target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Dengan Anggaran Rp. 6.570.240 realisasi Rp. 6.290.800 atau 95.75%.

    c. Koordinasi dan Penyusuan Dokumen DPA-SKPD

    Indikator kinerja dari sub kegiatan ini jumlah dokumen dpa skpd yang disusun tepat waktu dengan target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Dengan anggran Rp. 5.510.675 Realisasi Rp. 4.986.775 atau 90,49%.

    d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target 10 dokumen dan terealisasi 10 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Dengan Anggaran Rp. 30.404.978 realisasi Rp. 26.106.480 atau sebesar 85,86%.

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan Anggaran Rp. 2.370.214.713 menyerap anggaran sebesar Rp. 2.280.542.569,00 dengan persentase realisasi 96,22%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah asn yang gaji dan tunjangan yang terbayarkan dengan target 21 orang dan terealisasi 21 orang serta capaian kinerja sebesar 100%. Dengan anggran Rp. 2.290.450.138 realisasi Rp. 2.208.009.744 atau 96,40%

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan//semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd yang disusun tepat waktu dengan target 18 dokumen dan terealisasi 18 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Dengan Anggaran Rp. 79.764.575 realisasi Rp. 72.532.825 atau sebesar 90.93%.

- **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar dengan target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau 100% dengan anggaran Rp. 23.354.500,- menyerap anggaran sebesar Rp. 22.884.000,00 dengan persentase realisasi 97,99%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah skpd yang disusun yang disusun dengan target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggran Rp. 23.354.500 realisasi Rp. 22.884.000 atau 97,99%

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 100% dan terealisasi 93,10% dengan anggaran Rp. 682.054.400.menyerap anggaran sebesar Rp. 475.561.220,00 dengan persentase realisasi 69,72%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan data dengan target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 353.875.000 dan realisasi Rp. 326.325.000 atau 92,21%.

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan dengan target 21 orang dan terealisasi 18 orang serta capaian kinerja sebesar 85,71%. Dengan Anggaran Rp. 328.179.400 dan realisasi Rp. 149.236.220 atau 45,47%.

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% dan terealisasi 96,80% dengan anggaran Rp. 1.171.182.700 menyerap anggaran sebesar Rp. 1.152.256.331,00 dengan persentase realisasi 98,39%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 9 jenis dan terealisasi 9 jenis serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 36.030.000 dan realisasi anggaran Rp. 35.679.800 atau 99,03%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 5 unit dan terealisasi 5 unit serta capaian kinerja sebesar 100%. Dengan Anggaran Rp. 101.977.400 dan realisasi Rp. 98.250.000 atau 96.34%;

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan dengan target 2 jenis dan terealisasi 2 jenis serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 4.772.000 dan realisasi Rp. 4.570.000 atau sebesar 95,77%;

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini jumlah bahan logistik yang disediakan dengan target 2 jenis dan terealisasi 2 jenis serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 110.705.000 realisasi Rp. 110.118.500 atau 99,47%;

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan target 2 jenis dan terealisasi 2 jenis serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 60.288.500 dan realisasi Rp. 57.634.000 atau 95,60%;

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan target 1835 eksampler dan terealisasi 1754 eksampler serta capaian kinerja sebesar 95,59%. Anggaran Rp. 216.900.000,- dan realisasi Rp. 212.400.000 atau 97,93%;

g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini jumlah tamu yang difasilitasi target 700 orang dan terealisasi 700 orang serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 159.239.800 realisasi Rp. 156.192.800 atau 98,09%

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan dengan target 120 kali dan terealisasi 114

kali serta capaian kinerja sebesar 95%. Anggaran sebesar Rp. 481.250.000 realisasi Rp. 477.411.231 atau 99,20%.

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dengan target 100% dan terealisasi 64,22% dengan anggaran sebesar Rp. 2.965.630.000 menyerap anggaran sebesar Rp. 2.353.262.317,00 dengan persentase realisasi 79,35%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a.Pengadaan Mebel

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini jumlah mebel yang diadakan dengan target 3 paket dan terealisasi 3 paket serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 124.200.000 realisasi Rp. 98.755.500,- atau 79,51%

b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan dengan target 5 unit dan teralisasi 3 unit serta capaian kinerja sebesar 60%. Anggaran sebesar Rp. 2.493.930.000 realisasi Rp. 2.012.717.817 atau 80.70%. Sub Kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan Terdapat Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah dan Belanja Modal Penataan Halaman Rujab Ketua DPRD DiBatalkan karena waktu yang tersedia untuk pekerjaan tersebut tidak memungkinkan;

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan dengan target 3 paket dan teralisasi 3 paket serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 267.500.000 realisasi sebesar Rp. 241.789.000 atau 90,39%;

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan dengan target 3 unit dan teralisasi 0 serta capaian kinerja 0%. Anggaran Rp. 80.000.000 dan

realisasi 0%. Sub kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakanPengadaan Lampu Jalan tidak terealisasi karena ada aturan yang bertentangan;

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemeritahan daerah dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan anggaran Rp. 859.301.984 menyerap anggaran sebesar Rp. 812.928.884,00 dengan persentase realisasi 94,60%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah surat masuk yang diagendakan dengan target 2400 surat dan terealisasi 2400 surat serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 47.549.984 dan realisasi Rp. 47.344.014 atau 99.57%;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah rekening bulanan telepon, air dan litrik kantor yang terbayarkan dengan target 36 rekening dan terealisasi 36 rekening serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 488.752.000 atau Rp. 464.084.870 atau 94.95%;

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah tenaga upah jasa yang terbayarkan dengan target 21 orang dan terealisasi 21 orang serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp. 323.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 301.500.000 atau 93,34%;

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah jumlah barang milk daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 924.589.500 dan menyerap anggaran sebesar Rp. 899.008.617,00 dengan persentase realisasi 97,23%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target 11 unit dan terealisasi 11 unti serta capaian kinerja sebesar 100%. Dengan anggaran sebesar Rp. 191.800.000 dan realisasi Rp. 188.391.340 atau 98,22 %;

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 203 unit dan terealisasi 183 unit serta capaian kinerja sebesar 90,15%. Anggaran Rp. 154.289.500 realisasi Rp. 150.375.000 atau 97,46%

c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

   Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah yang diasuransikan dengan target 6 unit dan terealisasi 6 unit serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran Rp. 54.000.000 realisasi Rp. 37.225.610 atau 68,94%

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

   Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dpelihara/direhabilitasi dengan target 3 unit dan terealisasi 3 unit serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp. 244.500.000 realisasi Rp. 243.676.667 atau 99.66%;

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

   Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dpelihara/direhabilitasi dengan target 3 unit dan terealisasi 3 unit serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp. 280.000.000 atau 279.340.000 atau 99,76%;

- **Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan target 100% dan terealisasi 97,00 dengan anggaran sebesar Rp. 12.609.301.531 menyerap anggaran sebesar Rp. 12.413.752.899,00 dengan persentase realisasi 98,45%. Pada dasarnya**

anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah bulanan gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang terbayarkan dengan target 30 orang dan terealisasi 30 orang serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp. 12.184.801.531 dan realisasi Rp. 12.070.582.899 atau 99,06%;

b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan dengan target 30 pasang dan terealisasi 30 pasang serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp. 322.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 314.318.700 atau 97,46;

c. Pelaksanaan Medical Check-Up

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan medical check-up dengan target 17 orang dan terealisasi 4 orang dengan capaian kinerja sebesar 23,53%. Anggaran sebesara Rp. 102.000.000 realisasi Rp. 28.851.300 atau 28,29%. Sub kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan Sulit menyesuaikan agenda kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD dengan jadwal Medical Check-Up.

- **Layanan Administrasi DPRD. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja layanan administrasi dengan target 100% dan terealisasi 85% dengan anggaran sebesar Rp. 1.478.450.000 menyerap anggaran sebesar Rp.1.386.955.000,00 dengan persentase realisasi 93,81%. Pada dasarnya anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:**

a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah rapat dan konsultasi DPRD yang diselenggarakan dengan target 4 kali dan terealisasi 2 kali serta capaian kinerja sebesar 50%. Anggaran sebesar Rp. 170.450.000 realisasi Rp. 79.300.000 atau 46.52%. Seb Kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan Fasilitasi koordinasi

dan Konsultasi DPRD terdapat rencian belanja penetapan Wakil Bupati tidak di Laksanakan oleh Partai Pengusung dan Beluam adanya PAW (disediakan);

b. Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah bahan/perlengkapan rumah tangga yang disediakan dengan target 3 jenis dan terealisasi 3 jenis serta capaian kinerja sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp. 1.308.000.000 dan realisasi Rp. 1.307.655.000 atau 99.97%

Adapun ulasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Program Rutin Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian target indikator kinerja dapat terealisasi
2. Rata-rata capaian target program rutin terealisasi hampir sesuai target yang direncanakan
3. Peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun target-target indikator.

a) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada Tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan program yang sama seperti pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik. 11. Perbandingan Realissi kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022

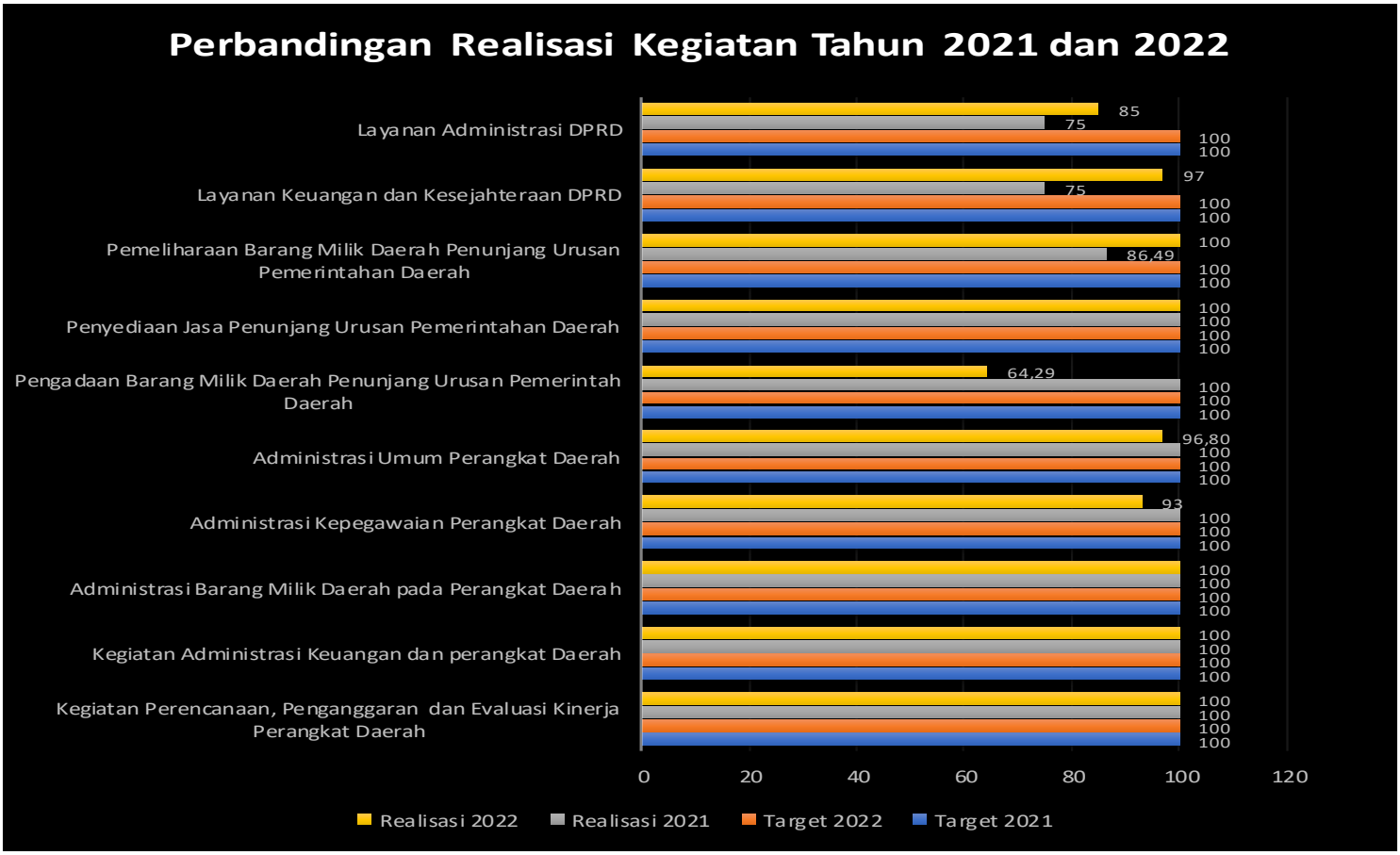

Bila dilihat tabel di atas kinerja program rutin cenderung relative hampir sama dengan realisasi kinerja Tahun 2022 . Selain itu juga adanya perubahan paradigma dan budaya kerja dan motivasi juga semangat dalam bekerja bagi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

b). Realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL. 3.13

REALISASI TAHUN 2022

URAIAN	Target	REALISASI	KET.
	2021	**2022**	
1	***2***	***3***	***7***
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	95,37	

Grafik. 12. Realisasi Keuangan Tahun 2022

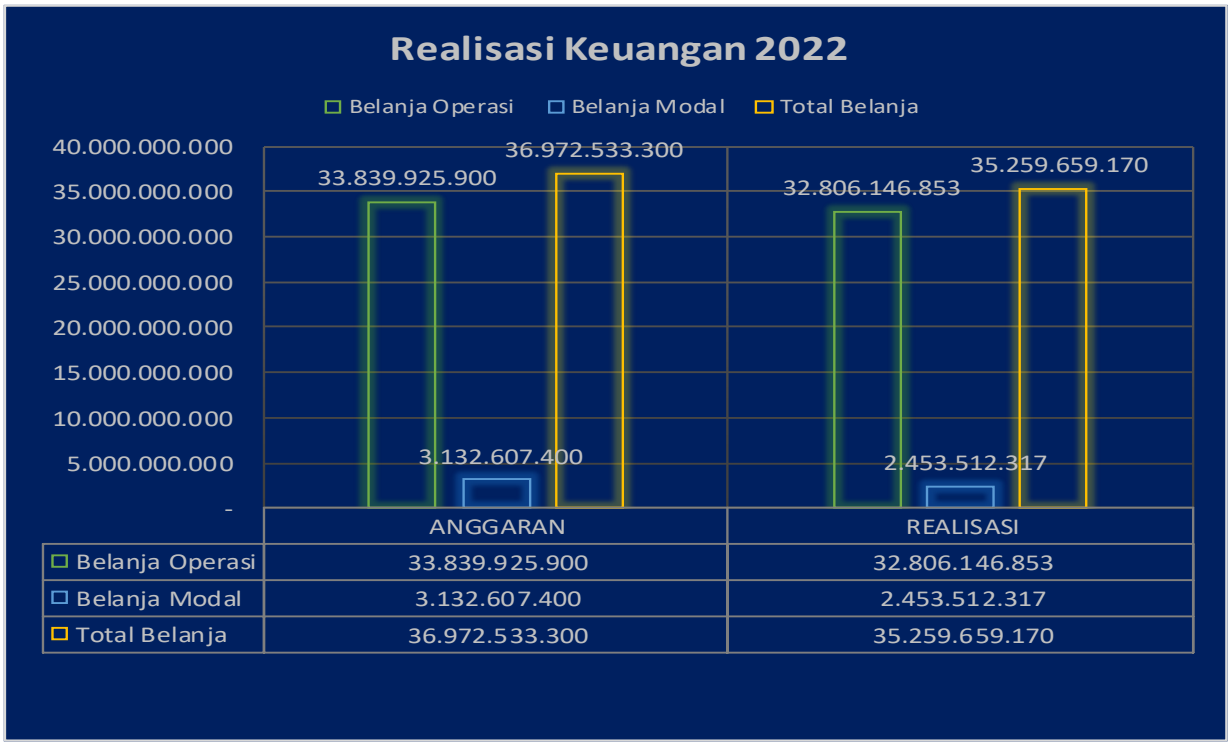

Dengan melihat perbandingan realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan capaian realisasi kinerja, maka dapat diprediksi pada akhir masa RPJMD pada Tahun 2023 dapat tercapai.

d). Untuk Program rutim ini dilihat dari total belanja anggaran pada Tahun 2022. Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 20202 ini adalah sebesar Rp. 22.583.936.949 ,- dan setelah perubahan anggaran mengalami **Peningkatan menjadi Rp**. **23.157.283.846**,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. **21.862.940.229**,- atau **95,37** persen. Dan rata-rata capaian kinerja sebesar **95% .**

TABEL 3.12

Pelaksanaan Urusan Penunjang

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Baguan Umum dan Keuangan	**Sekretariat DPRD**	**Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**95,00%**			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang	21 orang			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**100%**	**100%**			

				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**93%**			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	21 Orang			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**96,80%**			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	5 Unit			

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	2 Jenis			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	2 Jenis			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1835 Exampler	1754 Exampler			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	700 Porsi	700 Porsi			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 kali	114 kali			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**64,29%**	Terdapat Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah dan Belanja Modal Penataan Halaman Rujab Ketua DPRD DiBatalkan karena waktu yang tersediauntuk pekerjaan tersebut tidak memungkinkan	Akan melakukan evaluasi terhadap belanja modal, agar belanja modal dilaksanakan d tw 2 thn berikutnya	

				Pengadaan Mebel	3 Unit	3 Unit			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	3 Unit			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2400 Surat Masuk/Keluar	2400 Surat Masuk/Keluar			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening	36 Rekenin			

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21 Orang	21 Orang			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**212 Unit**	**97,15%**			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	11 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203 Unit	183 unit			
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6 Unit	6 unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 unit			

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit			
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**100%**	**97,00%**			
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	30 Orang	100%			
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	30 Orang	30 Orang			
				Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	17 Orang	4 Orang	Sulit menyesuaikan agenda kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD dengan jadwal Medical Check-Up.	Pada tahun 2021 akan dilakukan penentuan jadwal medical check-up lebih awal dari tahun 2020 sehingga dapat mengakomodir jadwal Mcu anggota DPRD dengan agenda kegiatannya.	

				Layanan Administrasi DPRD	**100%**	**85%**	**Pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD tidak mencapai target dikarenakan Pada sub Kegiatan Fasilitasi koordinasi dan Konsultasi DPRD terdapat rencian belanja penetapan Wakil Bupati tidak di Laksanakan oleh Partai Pengusung dan Beluam adanya PAW**	**pengurangan target yang disesuaikan dengan kebutuhan di tahun 2023**	
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Kali	2 Kali			
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3 Unit	3 Unit			

	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	**Sekretariat DPRD**	**Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	90%	88%			
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**54 Ranperda**	**30 Ranperda**	**pada Kegiatan Pembentukan Peraturan ranperda tidak mencapai target dikarenakan Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Pembahasan Ranperda penentuan target pada anggaran pokok tinggi dan pada saat perubahan anggaran tidak melakukan pengurangan target**		

				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	27 ranperda	24 ranperda			
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	27 Ranperda	23 Ranperda			
	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	**Sekretariat DPRD**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**7 dok**	**100%**			
				Pembahasan KUA dan PPAS	2 dok	2 dok			
				Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	2 dok	2 dok			
				Pembahasan APBD	1 dok	1 dok			
				Pembahasan APBD Perubahan	1 dok	1 dok			
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dok	1 dok			

	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	**Sekretariat DPRD**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**25 dok**	**100**			
				Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 dok	4 dok			
				Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	4 dok	4 dok			
				Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	4 dok	4 dok			
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3 dok	8 dok			
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10 rekomendasi	8 rekomendasi			
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	**Sekretariat DPRD**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**100%**			

				Pendalaman Tugas DPRD	2 kali	3 kali			
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	3 orang			
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	6 orang			
				Penyusunan Program Kerja DPRD	1 dok	1 dok			
	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	**Sekretariat DPRD**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100%**	**100%**			
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3 kali	3 kali			
				Pelaksanaan Reses	3 kali	3 kali			
	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	**Sekretariat DPRD**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**3 kali**	**3 kali**			

				Pengawasan Kode Etik DPRD	3 kali	3 kali			
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	**Sekretariat DPRD**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**5 jenis**	**5 jenis**			
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	5 Jenis	5 Jenis			
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	**Sekretariat DPRD**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**127 kali**	**127 kali**			
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80 kali	80 kali			
				Rapat Paripurna	35 kali	35 kali			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 kali	12 kali			

Dengan melihat perbandingan realisasi Tahun 2021 sampai dengan realisasi tahun sebelumnya yang dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan capaian realisasi kinerja, maka dapat diprediksi pada akhir masa RPJMD pada Tahun 2022 dapat tercapai.

TABEL 3.13
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SEKRETARIAT DPRD TA 2022

No	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	BELANJA			
1	**BELANJA OPERASI**	**33.839.825.900**	**32.733.146.783**	**96,73**
	Belanja Pegawai	14.527.931.669	14.278.592.643	98,28
	Belanja Barang dan Jasa	19.311.894.231	18.454.554.140	95,56
2	**BELANJA MODAL**	**3.132.607.400**	**2.526.512.317**	**80,65**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	558.677.400	513.794.500	91,97
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.493.930.000	2.012.717.817	80,70
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.000.000	-	0
Total		**36.972.433.300**	**35.259.659.100**	**95,37**

B.3. Analisis Efisiensi dan efektifitas Kinerja Kegiatan

B.3.1. Efisiensi

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD tahun anggaran 2022 ini telah dianggaran belanja langsung program dan kegiatan dengan pola anggaran maksimal. Sekretariat DPRD sebesar Rp. 16,228,555,798,-. Adalah suatu pencapaian yang baik bagi Sekretariat DPRD ketika mampu mencapai atau mendekati target sasaran Sekretariat DPRD dengan efisiensi dengan Formulasi = Realisasi Capaian Kinerja – realisasi keuangan atau (95 - 95,37= 0%) Jadi Efisiensi sebesar 0%.

B.3.2. Efektifitas

Sedangkan dalam aspek ini, dari target masing-masing sasaran,pencapaian efektifitas kegiatan yang menjadi sasaran utama dicapai, didapat dari nilai Unit Cost come, atau dengan kata lain Sekretariat DPRD dalam mampu memfasilitasi kegiatan ranperda dewan dalam menjalankan fungsi budgeting,legislasi dan pengawasan DPRD. Sebagai bahan evaluasi dan pekerjaan rumah terkait ranperda yang tidak dapat diselesaikan dan ditetapkan dan menjadi perda definitif yang menjadi tolak ukur akuntabilitas dalam pertanggungawaban biaya,tolak ukur komitmen kerja eksekutif dan legislatif pemerintahan daerah serta tolak ukur pencapaian manfaat yang akan diterima masyarakat atas suatu kebijakan yang dihasilkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (Dua) sasaran , ditetapkan indicator kinerja sasaran sebesar 3(Tiga) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022 merupakan tahun ke-1 dari rencana strategis Sekretariat DPRD Tahun 2012-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi dari semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja secretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indicator kinerja utama ditentukan oleh berbagai factor , antara lain sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 1(Satu) sasaran, terdapat 2 indikator utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2022 , 1(satu) indikator tidak memenuhi target yang ditetapkan dari total indicator.

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi Pemerintah,serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Malili, 23 Februari 2023

SEKRETARIS DPRD,

ASWAN AZIS,S.Pi, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. :19760316 200803 1 001

LAMPIRAN

.